

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.
3. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.
4. Belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.
5. Keempat variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.

B. Implikasi

1. Berdasarkan hasil penelitian, pajak daerah belum berperan secara optimal sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu lebih memaksimalkan pajak daerah dengan cara perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan basis pajak, dan pengelolaan pajak yang

lebih efisien supaya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

2. Berdasarkan hasil penelitian, retribusi daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu menerapkan evaluasi terhadap kebijakan retribusi, khususnya terkait keefektivitasan dan kualitas pelayanan publik yang disediakan, supaya retribusi tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat.
3. Berdasarkan temuan penelitian, belanja modal terbukti berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan serta mengoptimalkan pengalokasian belanja modal, khususnya pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, guna meningkatkan tingkat produktivitas dan daya saing daerah.
4. Temuan studi ini mengonfirmasi bahwa belanja barang dan jasa merupakan instrumen vital dalam mengakselerasi roda perekonomian daerah. Sebagai implikasinya, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan tata kelola belanja operasional dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan alokasi yang lebih presisi. Penguatan ketepatan sasaran pada pos belanja ini sangat krusial guna memastikan bahwa setiap serapan anggaran mampu menghasilkan *multiplier effect* yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi wilayah.
5. Hasil studi ini mengonfirmasi bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama rentang tahun 2021–2024

merupakan hasil dari interaksi simultan antara pajak daerah, retribusi, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Temuan tersebut menegaskan bahwa akselerasi output ekonomi daerah tidak dapat dicapai melalui instrumen fiskal yang terisolasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan publik yang terintegrasi, di mana sinkronisasi antara optimalisasi pendapatan asli daerah dan efektivitas pengeluaran pemerintah menjadi kunci utama dalam menstimulasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan rentang waktu 2021-2024, di mana periode tersebut merupakan masa transisi dan pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil pada awal periode penelitian, yaitu tahun 2021-2022 mengakibatkan data variabel fiskal maupun pertumbuhan ekonomi masih mengalami fluktuasi yang ekstrem atau anomali. Hal ini berpotensi memengaruhi konsistensi hasil estimasi, mengingat kebijakan penerimaan dan belanja daerah pada masa tersebut masih banyak diarahkan untuk penanganan dampak kesehatan dan pemulihan daya beli masyarakat daripada untuk penguatan struktur ekonomi jangka panjang.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel PAD (Pajak dan Retribusi) serta Belanja Daerah, sementara struktur pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara faktual masih sangat bergantung pada dana Transfer Ke

Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Keterbatasan ini tecermin dari nilai *R-Squared* yang relatif rendah, yaitu 39 persen, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah justru dipengaruhi oleh variabel di luar model, terutama dana transfer (DAU, DAK, DBH) yang memiliki porsi jauh lebih besar dalam menstimulus ekonomi daerah dibandingkan PAD. Tidak dimasukkannya unsur TKD dalam model penelitian ini membuat daya penjas kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal.

